

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah data yang sudah diolah dalam ringkasan dari proses pencatatan yang berbentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelola keuangan dana publik baik dari pajak, restribusi atau transaksi lainnya selama satu anggaran (Mardiasmo,2006). Upaya pertanggungjawaban pemerintah, dilakukan dengan menyampaikan pertanggungjawabannya berupa bentuk laporan keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala dalam bentuk barang yang dapat dijadikan milik negara atas pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas peyelenggaraan pemerintah daerah. Wujud nyata transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berbentuk laporan keuangan.

Laporan keuangan dari pemerintah daerah harus berkualitas, karena dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang

sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami (PP No.71 Tahun 2010). Indikator masing-masing sebagai berikut: (1) relevan dengan indikator memiliki umpan balik (*feedbackvalue*), memiliki manfaat prediktif (*peramalan*), tepat waktu dan lengkap; (2) andal merupakan indikator penyajian yang jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*), dan netralis; (3) dibandingkan dengan indikator konsisten penerapan kebijakan akuntansi, informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya; (4) dipahami dengan indikator bentuk dan istilah informasi laporan keuangan disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Tujuan diperlakukannya hal tersebut agar lebih *accountable* dan semakin meningkatkan dalam kualitas laporan keuangan.

Dalam tingkat baik dan buruknya laporan atas pengelolaan keuangan daerah selama satu periode. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas dilihat dari opini Badan Pengawas Keuangan (BPK) selaku badan yang memeriksa dan menilai LKPD. Sebelum LKPD diserahkan kepada DPRD, laporan keuangan harus diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal.

Berdasarkan data hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2011 sampai 2021 (bcpk.go.id). Merupakan WTP ke 10 kali yang diraih Pemkab Sleman secara berturut-turut. BPK menilai, selama 10 tahun terakhir

Pemkab Sleman mampu mengelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Opini kewajaran tersebut didasarkan pada kriteria (a) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (b) efektivitas sistem pengendalian internal; (c) penerapan Standar Akuntansi Pemerintah; (d) pengungkapan yang cukup. Menurut Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo keberhasilan Pemkab Sleman memperoleh opini WTP tidak lepas dari peran penting BPK dalam membina sehingga sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). (harianjogja.com/jogapolitan).

Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, dibutuhkan Sistem Pengendalian Intern. Sistem Pengendalian Intern (SPI) meliputi struktur organisasi dalam suatu perusahaan sebagai alat yang dikoordinasi dalam menjaga kekayaan organisasi, memeriksa dan mengecek data akuntansi keuangan, serta menjaga kebijakan manajemen yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian intern adalah metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain dalam memberi jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efisiensi dan efektifitas operasi, kendala laporan keuangan, dan kepatuhan hukum dan Peraturan Perundang-undangan berlaku (Mulyadi, 2013:163). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP Nomor 60 Tahun 2008). Untuk itu, dengan adanya sistem pengendalian intren yang baik, maka laporan keuangan pemerintah daerah

akan dapat memenuhi nilai informasi yang disyaratkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Untary & Ardiyanto, 2015).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (3), mengemukakan sistem akuntansi pemerintah daerah dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai pelaporan keuangan dalam rangka tanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dimana dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Setiap entitas laporan dan entitas akuntansi harus dapat menyelenggarakan sistem akuntansi sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum atau dalam internasional yang dikenal dengan *International Accounting Standar Board* (IASB) untuk sekarang menyebutnya dengan *International Financial Reporting Standar* (IFRS) yang merupakan prasyarat dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas di dalam sebuah perusahaan (Nugraheni & Subaweh, 2008).

Anggaran yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena peran penting pemerintah kepada masyarakat untuk mewujudkan optimalisasi dan tujuan penting dari keberadaan organisasi pemerintah (Siswadhi, 2017). Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus merencanakan dan menyelenggarakan program-program kerja yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan kepuasan masyarakat

yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan membuat laporan keuangan serta memerlihatkan sebagai bukti sikap pertanggungjawabnya dalam bentuk laporan keuangan. Dalam Tujuan SAP adalah sebagai bentuk pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan dasar hukum yang dimulai dari UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara sampai PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Lyna & Sabeni, 2007).

Sistem akuntansi keuangan daerah erat sekali kaitannya dengan prosedur pengukuran, pencatatan, penggolongan dan pelaporan akuntansi dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) pada periode tertentu, karena dalam mengambil langkah masa depan pemerintah daerah.

Kapasitas SDM merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki sumber daya manusia dengan kapasitas yang didukung latar belakang pendidikan. Kegagalan sumber daya manusia dalam memahami logika akuntansi disebabkan sumber daya manusia tidak dibekali dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bidang keuangan, hal ini menimbulkan dampak kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian dengan laporan standar yang ditetapkan pemerintah (Yosefrinaldi, 2013).

Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pernah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya di Indonesia, yaitu Hanifa, Lia dkk (2016) meneliti

dengan judul Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa hasil penelitiannya berpengaruh signifikan dan positif terhadap laporan keuangan baik secara parsial maupun simultan. Dalam artian semakin baik kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Mamahit, Sondakh dan Ilat (2017) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah menyatakan bahwa hasil penelitian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap laporan keuangan daerah di daerah kabupaten Minahasa Selatan. Tetapi dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tiap-tiap SKPD kabupaten Minahasa Selatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, menunjukkan bahwa dari hasil yang berbeda-beda membuat saya tertarik untuk meneliti melakukan penelitian tentang variabel Sistem Pengendalian Intern, variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Sleman. Dari penelitian sebelumnya, peneliti menambah variabel independen yaitu, Sistem Pengendalian Intern di uji terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh “Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Sleman”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini difokuskan pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sleman. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 bertempat di Pemda Sleman pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman. Penelitian ini menguji tiga variabel yang berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, untuk menguji pengaruh positif:

1. Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4. Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan bukti secara empiris pengaruh variabel Sistem Pengendalian Intern, variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman:
 - a. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bahan tambahan dalam pengembangan ilmu akademik.
 - b. Bagi peneliti, dapat memberikan informasi yang digunakan dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian intren, sistem akuntansi keuangan daerah, dan

kapasitas sumber daya manusia sehingga tujuan pemerintah daerah dapat tercapai.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa atau mahasiswi dalam berfikir dan sebagai masukan kepada peneliti selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis, terdiri dari lima bab. Setiap bab terdapat subbab yang lebih memperinci penjelasan. Adapun isi pembahasan dalam setiap babnya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pemamparan dari latar belakang penelitian menjelaskan permasalahan yang menjadi landasan dilakukannya penelitian ini. Kemudian disusun rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam pembahasan penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

Bab ini berisi studi literatur yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Bab ini dipaparkan mengenai teori-teori dari variabel yang dipakai seperti teori sistem pengendalian intern, teori sistem akuntansi keuangan

daerah dan teori kapasitas sumber daya manusia. Juga dipaparkan penelitian sebelumnya dengan tema terkait. Serta berisi kerangka pikir dan pengembangan dari penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Bab ini berisi pembahasan yang meliputi jenis penelitian; populasi dan sampel penelitian; data penelitian; jenis dan sumber data; Teknik pengumpulan data; definisi dan pengukuran variabel yang akan digunakan; serta rancangan analisis data.

BAB IV DATA DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi pemaparan dari hasil penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi analisis data secara deskriptif secara analisis yang berkaitan dengan hasil pengujian hipotesis.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian ini. Bab ini memaparkan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan, dan saran untuk penelitian atau pihak yang terkait dengan penelitian ini.